



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURHAYATI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 809393

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 26.500.000.000

1. Tanah Seluas 3763 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2615 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
3. Tanah Seluas 1355 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah Seluas 1812 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 2.000.000.000
6. Tanah Seluas 2630 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
7. Tanah Seluas 2894 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000.000
8. Tanah Seluas 1997 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000
9. Tanah Seluas 1311 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 215.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI MBRG/ LIGHT TRUCK Tahun 1997, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 260.148.908

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 26.975.148.908

III. HUTANG

Rp. 30.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 26.945.148.908

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.